

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS

ADIATMA RIZKY P



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

ADIATMA RIZKY P

A111 13 314



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh

ADIATMA RIZKY P
A111 13 314

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Makassar, **14 Agustus 2020**

Pembimbing I



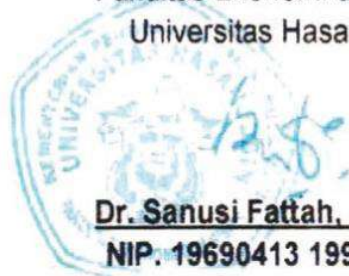
Dr. Sultan Suhat, SE., M.Si
NIP. 19691215 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si
NIP. 19871109 201404 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP. 19690413 199403 100



SKRIPSI

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh

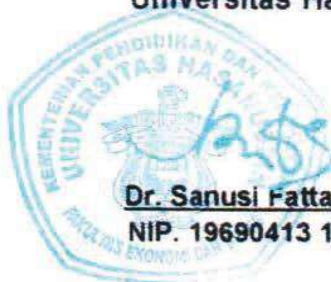
ADIATMA RIZKY P
A111 13 314

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 Agustus 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA	Anggota	3. 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP. 19690413 1994031 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ADIATMA RIZKY P
Nim : A 111 13 314
Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI / STRATA 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS

adalah karya ilmiah saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2020
Yang membuat pernyataan



ADIATMA RIZKY P



PRAKATA

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros**”, Tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat menyertai salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segala orang-orang yang tetap setia meniti jalannya sampai akhir zaman

Usaha dan upaya telah penulis kerahkan secara maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak akan mampu terbit tanpa bantuan dan dukungan dalam segala hal. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya secara khusus kepada kedua orangtua, **Windarto** dan **Hasna Sina**, serta saudara/i penulis, karena telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan moril dan materil dengan penuh kesabaran dan kepercayaan, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis agar senantiasa dalam kebaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik tanpa adanya *support*, bimbingan, serta saran dan

ng membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima pada,



1. Kedua orang tua dan keluarga peneliti yang selalu memberikan dukungan dan doanya serta pengorbanan yang tulus.
2. Prof. Dr. Nursini, SE., MA. selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama masa pendidikan.
3. Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing pertama dan Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si. selaku pembimbing kedua terima kasih atas arahan, waktu, dorongan dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga selesai dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA. dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si. selaku tim penguji, terima kasih atas masukan dan arahan serta waktu yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Aspar dan seluruh staf Akademik di jurusan Ilmu Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberi arahan untuk kelengkapan berkas Akademik dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Aso Mahantari dan seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Maros yang telah membantu dalam proses penelitian.
7. Keluarga Ekowowits FC atas kebersamaannya dan telah memberi dukungan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

serta semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



Akhirnya, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mengharap adanya kritik serta saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari predikat sempurna. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada penulis yang lain, baik dengan tema yang sama maupun dengan tema yang lain. Baik dengan paparan yang sejalan, maupun yang berseberangan dengan tulisan ini. Karena bagi penulis sendiri, perbedaan adalah sebuah keindahan, seperti halnya pelangi. Pelangi Indah karena memiliki banyak warna dan pelangi tak akan indah kelihatan jika hanya memiliki satu macam warna.

Makassar, 13 Agustus 2020



Adiatma Rizky P



ABSTRAK

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAROS

(2010-2019)

Adiatma Rizky P
Sultan Suhab
Munawwarah S Mubarak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan Jenis data sekunder yang terdiri dari data runtun waktu dari tahun 2010 sampai 2019 di Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan variabel Belanja pegawai (X_1) secara simultan berpengaruh Positif dengan nilai $F_{hitung} 1.114 > F_{tabel} 4.34$ dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana nilai Sig $0.009 < 0.05$. Hipotesis H_1 diterima. Kemudian, Belanja modal (X_2) secara simultan tidak berpengaruh dengan nilai $F_{hitung} 1.114 > F_{tabel} 4.34$ dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) yaitu Sig $0.378 > 0.05$. Hipotesis H_2 ditolak. Dan Belanja barang dan jasa (X_3) secara simultan berpengaruh Positif dengan nilai $F_{hitung} 1.114 > F_{tabel} 4.34$ dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) yaitu Sig $0.027 < 0.05$ artinya H_2 diterima.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.



ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL SPENDING ON ECONOMIC GROWTH IN MAROS REGENCY (2010-2019)

Adiatma Rizky
Sultan Suhab
Munawwarah S Mubarak

This study aims to determine the effect of regional spending on economic growth in Maros Regency. This research uses secondary data which consists of time series data from 2010 to 2019 in Maros Regency. The results showed that the employee expenditure variable (X1) simultaneously had a positive effect with the value of $F_{count} 1.114 > F_{table} 4.34$ and significant on economic growth where the Sig value was $0.009 < 0.05$. Hypothesis H1 is accepted. Then, capital expenditure (X2) simultaneously has no effect with the value of $F_{count} 1.114 > F_{table} 4.34$ and not significant to Economic Growth (Y1), namely Sig $0.378 > 0.05$. The H2 hypothesis is rejected. And shopping for goods and services (X3) simultaneously has a positive effect with the value of $F_{count} 1.114 > F_{table} 4.34$ and significant on economic growth (Y1), namely Sig $0.027 < 0.05$, meaning that H2 is accepted.

Keywords : Regional Spending, Economic Growth.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1. Belanja Daerah	9
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	10
2.2. Hubungan antar Variabel	16
2.3 Tinjauan Empiris	19
2.4. Kerangka Konseptual	21
2.5 Hipotesis	22



BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	23
3.2. Jenis dan Sumber Data	23
3.3. Metode Pengumpulan Data	23
3.4. Metode Analisis	23
3.5. Definisi Operaional Variabel	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian	29
4.2 Analisis Hasil	32
4.3 Pembahasan	41
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	Daftar Jenis Pajak Daerah yang Berlaku di Wilayah Kabupaten Maros berdasarkan Perda	4
1.2.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2011-2015	4
4.2.1	Deskriptif Variabel Penelitian	32
4.2.2	Hasil Uji Normalitas Residual	33
4.2.3	Hasil Uji Multikolonieritas	34
4.2.4	Hasil Uji Heteroskidastitas	35
4.2.5	Hasil Uji Autokorelasi	35
4.2.6	Hasil Uji Kelayakan Model	36
4.2.7	Hasil Uji F Simultan Berdasarkan Nilai Signifikansi	37
4.2.8	Hasil Uji F Simultan Berdasarkan Nilai Hitung dan Tabel	37
4.2.9	Hasil Uji t Parsial Berdasarkan Nilai Signifikansi	38
4.2.10	Hasil Uji t Parsial Berdasarkan Nilai Hitung dan Tabel	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	22
2.2 Proporsi Belanja Daerah di Kabupaten Maros	30
2.3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros	31
4.3 Kerangka Konseptual dengan Hasil Estimasi `	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1 Data yang digunakan	42
2 Hasil IBM SPSS versi 23	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2006).

Pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu hal sangat penting dalam aktivitas pemerintahan di Indonesia, dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam alenia ke IV Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945. Pengelolaan keuangan negara ini berkaitan erat dengan pengelolaan atas dana yang diterima (pendapatan negara) dan pengelolaan atas dana yang dikeluarkan (belanja negara). Pendapatan negara dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan belanja negara berkaitan dengan pengeluaran dana untuk mendanai suatu program atau kegiatan pemerintah.

tu contoh dari belanja negara adalah investasi.



Dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah yang mulai diterapkan pada era orde baru, pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah (pemerintah tingkat provinsi/ kabupaten) untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Adanya kebijakan mengenai otonomi daerah ini muncul karena melihat bahwa masing-masing daerah memiliki potensi dan ciri khas yang berbeda. Kesempatan untuk menjadi daerah yang mandiri terbuka lebar seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Namun hal ini juga menjadi suatu tantangan besar bagi daerah yang bersangkutan (Halim, 2008).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah mengenai pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dan masing-masing program dengan sumber daya yang terbatas. Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah

si belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan belanja rutin yang relatif kurang produktif (Gugus Wandira,2013).
aatn belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya



untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Gugus Wandira, 2013).

Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan anggaran Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah Untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal dan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros.. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Maros antara lain :



Tabel 1.1 Daftar Jenis Pajak Daerah yang Berlaku di Wilayah Kabupaten Maros berdasarkan Perda

NO.	Jenis Pajak Daerah	Peraturan Daerah
1	Pajak Parkir	Perda No. 6 Tahun 2010
2	BPHTB	Perda No. 1 Tahun 2011
3	Pajak Air Tanah	Perda No. 2 Tahun 2011
4	Pajak Restoran	Perda No. 3 Tahun 2011
5	Pajak Hiburan	Perda No. 11 Tahun 2011
6	Pajak Penerangan Jalan	Perda No. 12 Tahun 2011
7	Pajak Reklame	Perda No. 13 Tahun 2011
8	Pajak Hotel	Perda No. 14 Tahun 2011
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perda No. 15 Tahun 2011
10	Pajak Sarang Burung Walet	Perda No. 9 Tahun 2012
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	Perda No. 1 Tahun 2013

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Maros, 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Maros. Peningkatan pajak daerah dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Daerah		Kelebihan/Kekurangan Realisasi Terhadap Target (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah
	Target (RP)	Realisasi (RP)		
2011	54,277,437,122.00	55,666,414,545.00	1,388,977,423.00	102.56%
2012	51,496,101,953.00	61,335,048,290.00	9,838,946,337.00	119.11%
2013	57,311,323,947.00	55,534,298,483.00	-1,777,025,464.00	96.90%
2014	59,199,000,000.00	57,503,299,764.00	-1,695,700,236.00	97.14%
2015	60,000,000,000.00	64,898,605,476.00	-3,401,394,524.00	95.02%
	3,863,022.00	294,937,666,558.00	4,353,803,536.00	101.50%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Maros, 2016 (data diolah)



Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pajak daerah terealisasi dan melebihi dari target dari tahun 2011 sampai 2012 yakni 102.56 % dan 119.11 %. Sedangkan, rasio pertumbuhan pajak daerah selama 3 tahun terakhir mengalami kekurangan realisasi terhadap target yaitu 96.90 %, 97.14 % dan 95.02 %. Sehingga total realisasi secara keseluruhan dapat melebihi target sebanyak Rp. 4,353,803,536.00 (101.50 %). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah peran alokatif, dimana pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan secara efektif melalui alokasi yang tepat berdasarkan klasifikasi ekonomi dalam komposisi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki hasil yang berbeda, diantaranya adalah penelitian Priambodo (2015) dalam penelitian lainnya menyimpulkan bahwa belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap



indeks pembangunan manusia. Hasil berbeda didapatkan dalam penelitian Suryati (2015) yang menunjukkan belanja pegawai berpengaruh negatif dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019 ?
2. Bagaimanakah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019 ?
3. Bagaimanakah pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019 ?



1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pokok penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Kemudian gambaran tersebut, dapat dijadikan salah satu referensi bahan acuan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai tambahan referensi untuk melengkapi referensi yang sudah ada agar nantinya dapat memberikan masukan bagi penulis atau peneliti lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam periode anggaran tertentu digunakan untuk melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran. Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial.



Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

Pada hakekatnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal (anggaran *line item*), yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.
2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

Adanya perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) diterangkan sebagai berikut:

1. Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/ yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/ yang dialokasikan pada



atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Kemudian perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
2. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator keberhasilan ekonomi suatu daerah atau negara. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi akan mengindikasikan tinggi rendahnya kemakmuran dan pengangguran serta

an. Menurut Jhingan (2004), pertumbuhan ekonomi merupakan an jangka panjang secara perlahan dan mantap, yang terjadi melalui n tabungan dan produksi. Perkembangan ekonomi dapat



dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknis produksi, masyarakat dalam lembaga-lembaga, perubahan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, jhingan menjelaskan lebih jauh mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untu menetapkan struktur ekonomi suatu negara atau daerah dengan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan ideologi yang diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan tingkat kenaikan PDB rill pada suatu tahun tertentu apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai pengertian lain yaitu suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi sesaat, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, berkaitan kenaikan output perkapita, yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jumlah penduduk, perspektif jangka waktu

yang di perkirakan 10, 20, 50 tahun bahkan lebih dari itu.



Ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah atau negara, dapat menggunakan tiga cara pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Target penghidupan masyarakat, artinya apakah terdapat peningkatan konsumsi potensial saat sekarang, dibandingkan dengan tingkat konsumsi dimasa lampau.
2. Sumber-sumber produksi, apakah dalam daerah atau negara tersebut ditemukan sumber-sumber produksi baru, serta apakah sumber-sumber yang ada dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara efisien.
3. Tingkat pendapatan nasional, apakah pendapatan nasional sekarang lebih meningkat di bandingkan dengan pendapatan nasional masa sebelumnya.

Dalam hal ini menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Hal ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi yang berasal dari berbagai aliran. Yaitu :

1. Aliran historis, aliran historis berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan bertahap. Pelopor aliran historis yaitu Frederich list, Karl Bucher, Hildebrand, Wegner, Sombart, W.W. Rostow.

Aliran klasik, pelopor aliran klasik antara lain adalah Adam Smith, David Ricardo dan Arthur Lewis. Adam Smith, berpendapat bahwa proses



pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan output dan pertumbuhan output tidak dapat lepas dari pertumbuhan penduduk. Kedua pertumbuhan ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu SDA yang tersedia, jumlah penduduk, persediaan barang. David Richardo menambahkan bahwa perkembangan perekonomian akan di tandai oleh ciri-ciri seperti tanah terbatas jumlahnya, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun apakah sesuai dengan tingkat upah di atas/dibawah tingkat upah minimal yang tersebut dengan tingkat upah alamiah, akumulasi capital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik mereka diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi, dari waktu kewaktu terjadi kemajuan teknologi, serta sektor pertanian dominan. Arthur Lewis, terkenal dengan model pertumbuhan dengan suplai tenaga kerja yang tidak terbatas. J.M Keynes, menyatakan bahwa peningkatan GNP tidak dilihat dari RTP, tetapi dari RTK, yaitu dengan cara meningkatkan permintaan efektif.

3. Schumpeter, menyatakan bahwa untuk meningkatkan GNP pengusaha harus dinamis. Dinamis artinya mampu menciptakan new combination melalui inovasi dalam proses produksi sehingga akan memenangkan dalam persaingan dalam pasar.

Sadono (2008) mengemukakan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli ekonomi. Dalam zaman ahli-ahli ekonomi klasik lebih banyak lagi yang telah dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal yaitu *An*



inquiry into the nature and causes of the wealth nations atau dengan singkat *the wealth of nations* adalah pada hakikatnya adalah suatu analisa mengenai sebab-sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan itu. Berikut teori-teori pertumbuhan ekonomi berbagai aliran.

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas alam dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pada teori pertumbuhan klasik yang baru diterangkan, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan diantara pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Akan tetapi, apabila penduduk semakin banyak bukan hasil perubahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Karena itu, pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin

ertumbuhannya.



2. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisien kegiatan perusahaan.

Menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu penanam modal otonomi dan penanam modal terpengaruh. Penanam modal otonomi adalah penanam modal yang ditimbulkan pada kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. Menurut Scumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary* atau *state*”. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi.

3. Teori Harrod-Domar

Dalam analisa mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau



steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan yaitu barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, rasio modal produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya, perekonomian terdiri dari dua sektor.

4. Teori pertumbuhan neo-klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovist dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Masalah Teoritis Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Badrudin (2011), Penerimaan gaji dan honorarium di daerah bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan dan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan



pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sasana (2012) secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung seperti belanja pegawai yang dilakukan secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan publik, pelayanan publik semakin baik akan menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian.

2.2.2 Masalah Teoritis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Halim (2008), belanja modal merupakan bentuk investasi yang merupakan *capital expenditure* sebagai belanja/biaya pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan

...tahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya

...a dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani

...kat. Belanja modal digunakan untuk membangun infrastruktur di



daerah berupa jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan serta infrastruktur pendukung lain seperti pelabuhan, irigasi dan pasar, dengan infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing daerah yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi di daerah tersebut. Menurut Aviliani (2009), infrastruktur merupakan bagian penting dalam perekonomian mengingat fungsinya sebagai pendukung dalam kegiatan termasuk untuk mendorong kegiatan investasi, sehingga diperlukan pengeluaran pemerintah berupa belanja modal untuk menciptakan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi tersebut.

Menurut Badrudin (2011), belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Disamping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan diberbagai ruang publik yang tersedia.



2.2.3 Masalah Teoritis Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok belanja langsung digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Badrudin (2012) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa pemerintah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Hasil penelitian Hutabarat (2013), membuktikan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Megawati Sularno (2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap

Modal.



Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)”. Adapun Hasil penelitian tersebut ialah secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU.

Fani Wiraswasta, dkk (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan PAD mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi, ataupun tidak langsung melalui mediasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

John Meynard Keynes dalam mankiw (2007), menjelaskan teori ekonominya dalam buku yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money” dimana inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat yang

garuhi situasi makro, agar dapat mendekati posisi “Full Employment”

ngaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi kemampuan

nerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan,

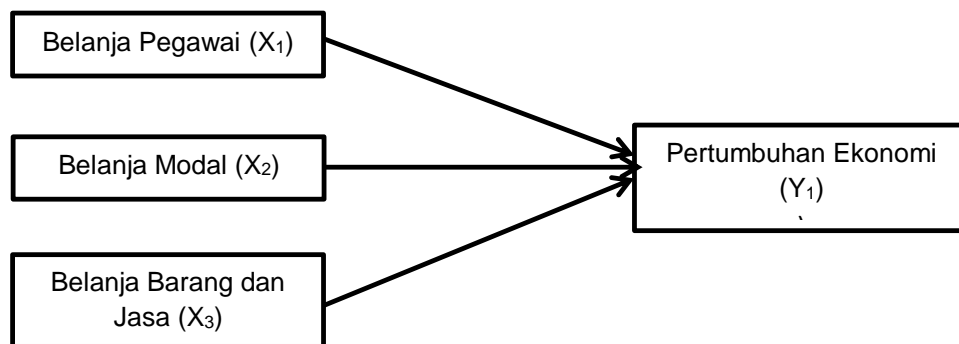


kesehatan, dan perlindungan, kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk belanja pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa.

2.4 Kerangka Konseptual

Atas dasar tinjauan teoritis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Kerangka pemikiran disusun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019.
2. Diduga belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019.
3. Diduga belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang dijadikan fokus adalah mengetahui Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros tahun 2010 – 2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data runtut waktu (*time series*) dalam kurung waktu 2010 – 2019 di Kabupaten Maros yang terdiri dari variabel Belanja Daerah dan Pertumbuhan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Instansi yang terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan pustaka berupa buku-buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan untuk



menguji hipotesis adalah regresi berganda, karena menyangkut lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

a = Konstanta

X₁ = Belanja Pegawai (BP)

X₂ = Belanja Modal (BM)

X₃ = Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

b₁ = Koefisien regresi BP

b₂ = Koefisien regresi BM

b₃ = Koefisien regresi BBJ

e = Pengganggu (*Error*)

Adapun pengujian hipotesisi yang digunakan antara lain

1) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keudanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan

menggunakan *kolmogorov-smirnov* (KS) dengan kriteria pengujian α

dimana:



- (a) Jika $\sigma \geq \alpha$ berarti residual terdistribusi normal
- (b) Jika $\sigma \leq \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser*. Apabila $\sigma > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2007), model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

c) Uji Autokolerasi

Pengujian autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi, menggunakan uji *Durbin- Watson*. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari adanya autokorelasi, Ghozali (2009). Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Metode yang digunakan adalah *Durbin Watson*.



Kriteria pengujiannya sebagai berikut :

- (a) Angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif
- (b) Angka DW di antara -2 sampai dengan +2 maka tidak ada autokorelasi
- (c) Angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi negatif

2) Uji Signifikasi (Uji – F)

Uji F ini dilakukan untuk menguji secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $sig < 0,05$, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $sig > 0,05$, menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) 0,05$.

3) Uji Parsial (Uji –t)

Uji t ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Hal ini diperoleh dengan rumus :

$$t = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$



Keterangan :

β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel

$S\beta_n$ = Standar error dari masing-masing variabel

3.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan batasan penelitian yang memudahkan analisis, dijabarkan beberapa definisi operasional variabel dan indikator pengukurannya dalam penelitian ini.

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Menurut DJPK pengukuran belanja pegawai adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase BP} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100$$

2. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

adalah pengukuran belanja modal :



$$\text{Persentase BM} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100$$

3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

$$\text{Persentase BJ} = \frac{\text{Belanja Barang dan Jasa}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100$$

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt} - 1)}{\text{PDRBt} - 1} \times 100 \%$$



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Variabel Penelitian

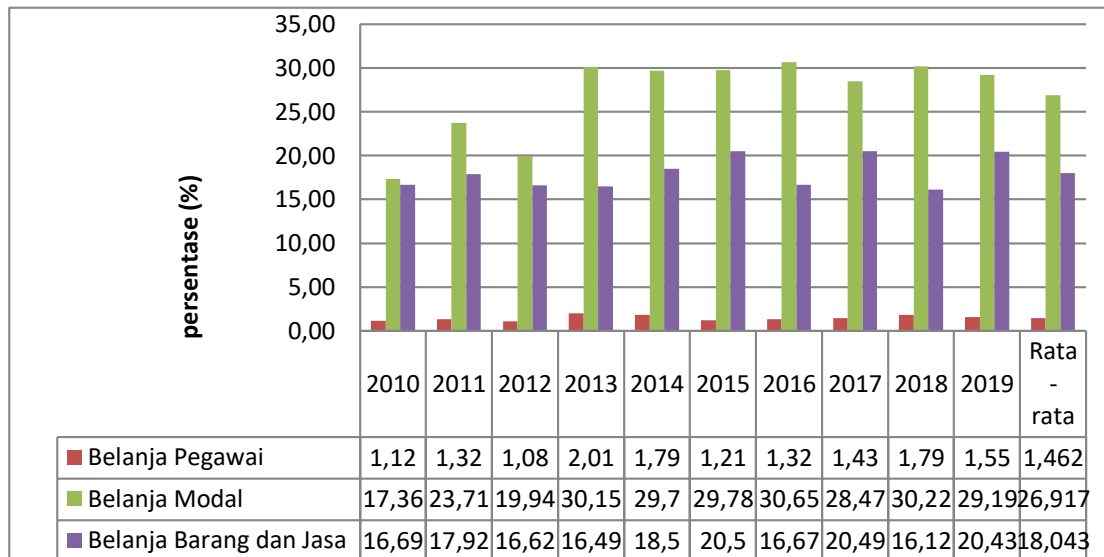
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang perkembangan variabel penelitian, yaitu Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dari tahun 2010 – 2019.

4.1.1. Perkembangan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari belanja penyelenggaraan urusan wajib, belanja penyelenggaraan urusan pilihan dan belanja penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau dengan pemerintah daerah lain. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi menurut jenis belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun Realisasi belanja daerah kabupaten Maros tahun 2010 – 2019 sebagai berikut :



Gambar 4.1
Proporsi Belanja Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2010 - 2019



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa proporsi belanja pegawai di kabupaten maros dari tahun 2010-2019 rata-rata 1.462%, proporsi belanja modal dari tahun 2010-2019 mencapai rata-rata 26.917% dan proporsi belanja barang dan jasa dari tahun 2010-2019 rata-rata 18.043%. Besarnya proporsi belanja modal dibandingkan dengan yang lainnya berkaitan erat dengan pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang meningkat secara berturut-turut.

4.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator keberhasilan ekonomi suatu daerah atau negara. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi akan

menyebabkan tinggi rendahnya kemakmuran dan pengangguran serta

